BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kepemimpinan

Kata "pemimpin" muncul tahun 1300. Malayu Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* menyatakan kepemimpinan adalah "Cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi" (Hasibuan, 2007:170). Pendapat Hasibuan menyatakan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para bawahannya, dengan berbagai cara yang dimiliki, agar para bawahannya dapat bekerja secara bersama untuk melakukan dan melaksanankan apa yang pemimpin tersebut kehendaki demi tercapainya tujuan organisasi. Harbani Pasolong dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Birokrasi* mengemukakan berikut:

> "Perilaku yang diharapkan dari kepemimpinan birokrasi adalah perilaku yang menyesuaikan dengan situasi dilingkungan birokrasi. Jika dilingkungan birokrasi banyak yang tidak jujur, maka pemimpin birokrasi harus memberikan contoh kepada bawahannya dengan berperilaku jujur. Jika para bawahan ditemukan tidak disiplin, maka pemimpin memberikan contoh kepada bawahannya dengan berperilaku disiplin. Jika dalam birokrasi ditemukan banyak yang korup, maka pemimpin birokrasi harus berani memberikan sanksi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, dan pemimpin birokrasi memberikan contoh bahwa memang dirinya bersih tidak bebas dari perilaku korup" (Pasolong, 2013:80)

Pendapat Harbani Pasolong menyatakan bahwa pemimpin yang baik harus mampu memberikan contoh yang baik untuk menjadi seorang yang dapat diteladani oleh para bawahanya. Pemimpin harus dapat memberikan sanksi terhadap

bawahannya yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, demi merubah kebiasaan, kondisi dan situasi yang terjadi didalam organisasi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pamudji dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* mengatakan :

> "Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata ini muncul kata kerja memimpin yang berarti menuntun atau membimbing. Dari kata ini juga muncul kata pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Sementara itu keseluruhan proses yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan kepemimpinan". (Pamudji, 1995:5)

Pendapat Pamudji di atas menunjukan bahwa seorang pemimpin itu membimbing atau menuntun bawahannya dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu maupun tujuan organisasi. Kepemimpinan menurut Inu Kencana Syafiie dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, sebagai berikut:

> “Kepemimpinan adalah kemampuan dan keperibadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikan yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok”(Syafiie, 2003:1)

Pendapat Inu Kencana Syafiie di atas menunjukan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan kepribadian untuk mempengaruhi dan membujuk masyarakatnya untuk melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dalam management* mengatakan kepemimpinan adalah:

> “Kegiatan mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok, kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan

> seseorang menunjukan kemampuannya untuk mempengaruhi prilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu". (Thoha, 2013:50)

Pendapat Miftah Thoha di atas menunjukan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki seni mempengaruhi orang lain, yang dapat dilakukan baik itu terhadap bawahan yang ada pada organisasinya maupun terhadap organisasi lain. Seseorang tidak dapat dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan bilamana orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya tujuan yang diinginkan. Simpulan dari beberapa teori konsep diatas yaitu kepemimpinan merupakan suatu cara seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpi yang memberikan arahan, bimbingan, arahan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.1.1 Gaya Kepemimpinan

Tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi akan ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut, dan setiap kebijakan yang diambilnya akan berpengaruh terhadap terjadinya gerakan dari setiap elemen yang ada pada bagian kerjanya, Veithzal Rivai dalam bukunya *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Edisi Ketiga menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut :

> "Gaya kepemimpinan merupakan dasar mengklasifikasikan tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu yang mementingkan palaksanan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama dan yang mementingkan hasil yang dicapai." (Rivai, 2012:45)

Menurut Veithzal Rivai di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga pola dasar gaya kepemimpinan yaitu pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama dan hasil yang dicapai.

Aktivitas dari suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang dimilikinya, Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Edisi Ketiga menyatakan pengambilan keputusan sebagai berikut:

> "Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan penetapan suatu alternatif pemecahan masalah yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, untuk itu diperlukan teknik pengambilan keputusan dengan membuat langkah-langkah yang logis dan sistematis yang meliputi, merumuskan masalah, mengumulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan." (Rivai, 2012:129)

Menurut Veithzal di atas menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi penting untuk diperhatikan. Teknik pengambilan keputusan dari seorang pemimpin untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan cara, merumuskan masalah terlebih dahulu, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan.

Gaya kepemimpinan seseorang akan memperlihatkan baik atau tidaknya hubungan kerjasama yang dijalin oleh pemimpin tersebut, baik itu berupa koordinasi maupun komunikasi. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, menyatakan koordinasi sebagai berikut: "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi" (Hasibuan, 2007:85).

Berdasarkan pendapat di atas, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi koordinasi terhadap para bawahannya. Koordinasi tersebut berupa pengarahan, penyatupaduan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan dari para bawahannya, yang bertujuan agar setiap komponen didalam unit kerja dapat bergerak secara bersamaan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Gaya kepemimpinan dapat diukur dari sejauh mana hasil yang dicapai oleh seorang pemimpin dalam upayanya untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya, hasil yang dicapai tersebut dapat berupa efektifitas, kepuasan kerja, maupun kepuasan masyarakat. Menurut Abdurahmat dalam buku *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama* menyatakan efektifitas sebagai berikut "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya." (Abdurahmat, 2008:36).

Berdasarkan pendapat di atas, efektivitas gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat dilihat dari sejauhmana pemimpin tersebut mampu memanfaatkan berbagai macam alat bantu yang telah tersedia, seperti sumberdaya, sarana dan prasarana, agar setiap pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Inu Kencana Syafi'ie dalam buku *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia,* terdapat beberapa gaya kepemimpinan pemerintahan yaitu :

1. "Gaya Demokratis
   Gaya ini dalam menunjukan cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antar bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama.
2. Gaya Birokratis
   Gaya Birokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpinan pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (*rule*), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana.
3. Gaya Kebebasan
   Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpinan pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini dikenal juga dengan *Laissez Fraire* atau *liberalism.*
4. Gaya Otokratis
   Gaya otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpinan pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan metode paksaan kekuasaan (*coercive power*)
   Gaya ini hanya diterapkan pada keadaan situasi antara lain sebagai berikut dibawah ini :
   a. Untuk menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan
   b.Untuk keseragaman antar bawahan
   c. Agar pemimpin pemerintahan tidak diganggu gugat
   d. Agar menekan faham separatisme
   e. Untuk meningkatkan pengawasan
   f. Untuk mempercapai tujuan."
   (Inu Kencana Syafi'ie, 2003:27-31)

Pendapat dari Inu Kencana Syafi'ie di atas dapat disimpulkan, bahwa gaya kepemimpinan demokratis dilakukan dengan musyawarah secara adil, sehingga mengajak bawahan untuk membagi tugas agar mencapai kesepakatan bersama. Gaya kepemimpinan birokratis dilakukan oleh seorang pemimpin dimana pekerjaannya hanya dilakukan di kantor

dengan cara formal. Gaya kepemimpinan otokratis menunjukan seorang pemimpin memiliki cara paksaan kekuasaan kepada bawahan untuk meningkatkan pengawasan dan mencapai tujuan bersama.

Miftah Thoha dalam buku *Kepemimpinan dalam Manajemen*, menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut, ”Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain”. (Thoha, 1993:124). Pendapat Miftah Thoha menyatakan bahwa pemimpin dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan gaya-gaya kepemimpinannya, gaya kepemimpinan tersebut dapat berupa prilaku, sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut yang ditunjukan. Menurut Miftah Thoha ada empat gaya dasar kepemimpinan yang biasa dipakai dalam pengambilan keputusan yaitu :

1. “Instruksi, gaya pemimpin tipe ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bilamana, dan dimana melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin.
2. Konsultasi, perilaku pemimpin ini tinggi pengarahan dan tinggi dukungan. Pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatnya komunikasi dua arah dan perilaku mendukung. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian (control) atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin.
3. Partisipasi, pemimpin dengan gaya kepemimpinan partisipasi, lebih menekankan pada dukungan tetapi rendah pengarahan, karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin dan pengikut saling tukar-menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut.
4. Delegasi, perilaku pemimpin ini rendah dukungan dan rendah pengarahan atas tugas yang diberikan kepada bawahan. Bawahanlah

> yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan pertunjukan mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri. Gaya kepemimpinan delegasi banyak terdapat pada struktural pemerintahan."
> (Thoha, 2013:66-68)

Berdasarkan keempat gaya dasar kepemimpinan yang dijelaskan oleh Miftah Thoha adalah gaya yang biasa diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Gaya kepemimpinan yang bertipe instruksi mungkin tidak bisa memahami sifat dan tingkah karyawan dengan seksama, bila pemimpin hanya menginstruksikan kepada bawahan keakraban atasan dan bawahan sangat kurang. Pemimpin seharusnya memperhatikan pekerjaan karyawan atau bawahan dan saling berkomunikasi untuk meningkatkan stabilitas kerja di organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan yang bertipe konsultasi menggunakan cara komunikasi dalam satu ruangan demi untuk pembuatan keputusan dan pemberian tugas kepada masing-masing bawahan dengan menampung masukan-masukan dari bawahan. Gaya kepemimpinan partisipasi, dimana seorang pemimpin membantu dengan memberi dukungan akan tetapi sangat rendah dalam pengarahan. Satu tipe kepemimpinan delegasi yang selalu mewakilkan pada bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan sebagai berikut :

1. "Kepemimpinan Otoriter
   Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaannya hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan

tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kepemimpinan partisipatif
   Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan.
3. Kepemimpinan Delegatif
   Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan kekuasaan."
   (Hasibuan, 2007:172)

Gaya Kepemimpinan menurut Hasibuan pada intinya tentang pelaksanaan dari ketiga pola tersebut yaitu diterapkan secara bersama-sama karena bila dilakukan secara bersama-sama maka akan tercapai tugas yang diperintahkan oleh pemimpin. Ketiga tipe kepemimpinan diatas dalam praktiknya dapat dikatakan saling mengisi satu sama lain, ketiga tipe kepemimpinan bisa disesuaikan dengan keadaan situasi yang akan menghasilkan kepemimpinan yang terlihat efektif.

2.1.1.2 Ciri-Ciri dan Indikator Kepemimpinan

Menurut Siagian, indikator-indikator kepemimpinan yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. "Iklim saling mempercayai
b. Penghargaan terhadap ide bawahan
c. Memperhitungkan perasaan para bawahan
d. Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan
e. Perhatian pada kesejahteraan bawahan
f. Pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan proporsional
g. Memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya"

(Siagian, 2010:121-122)

Keenam indikator dari Siagian diatas merupakan faktor efektivitas dalam dunia kepemimpinan yang dipengaruhi oleh perilaku yang menyebabkan para bawahan senang datang kepadanya untuk menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi. Indikator dari Siagian sangat berguna untuk dipelajari sampai sejauh mana sikap seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan kepada bawahan dengan menghitung dari sebuah kepuasan kerja dalam penyelesaian tugasnya. Teori mengenai ciri-ciri pendekatan perilaku kepemimpinan dikemukakan oleh Sutarto dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, sebagai berikut:

> a. "Memperhatikan kebutuhan bawahan atau memberikan motivasi
> b. Menciptakan suasana saling percaya dan saling harga menghargai
> c. Simpati terhadap bawahan dan memiliki sikap bersahabat
> d. Menumbuhkan peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan
> e. Lebih mengutamakan pengarahan diri, mendisiplinkan diri dan mengontrol diri."
>
> (Sutarto, 2012:68)

Kelima ciri pendekatan perilaku kepemimpinan ini merupakan suatu sikap yang terpenting dalam membentuk seorang pemimpin yang dapat menciptakan sebuah suasana kerja menjadi lebih kondusif dengan cara memperhatikan bawahan yang diberi motivasi bekerja. Pendekatan ini dapat menjadikan sikap pemimpin diketahui oleh bawahan atau masyarakat dan membuat organisasi menjadi sahabat serta simpati. Seorang pemimpin memiliki peran dalam memenuhi suatu kebutuhan bawahan dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.3 Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia

Kepemimpinan sering dikaitkan dan dihubungkan dalam aspek pemerintahan, maka memunculkan sebuah disiplin ilmu baru yaitu kepemimpinan

pemerintahan. Menurut Pamudji dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* ,mengungkapkan bahwa :

> "Kepemimpinan pemerintahan dalam menggerakan dan mengarahkan bawahan atau masyarakat sedapat mungkin dengan mempergunakan pendekatan-pendekatan manusiawi, sehingga mereka tergerak dan terarah secara sukarela karena sesuai dengan harapan-harapan, keinginan-keinginan dan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan mereka" (Pamudji, 1995:61)

Pendapat di atas menunjukan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah suatu sikap menggerakan dan mengarahkan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan manusiawi demi tercapainya kebutuhan, keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Inu Kencana Syafi'ie menambahkan dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* bahwa kepemimpinan pemerintahan Indonesia dapat dijelaskan melalui 3 hal yaitu sebagai ilmu, sebagai seni dan sebagai moral.

1. "Kepemimpinan pemerintahan sebagai ilmu,
   Sebagai cabang ilmu pemerintahan pada gilirannya, kepemimpinan pemerintahan akan menjadi disiplin ilmu, bila kepemimpinan secara umum masih berbagai titik pandang disiplin ilmu yang memilikinya seperti ilmu jiwa, ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu politik maka karena kepemimpinan pemerintahan berbeda dengan kepemimpinan swasta yang spesifik, maka kepemimpinan pemerintahan dapat dikaji secara khas obyek, subyek, sistematika, metode, keuniversalan, terminologi, filosofi, teori, prinsip, dalil, rumus dan cara mempelajarinya.
2. Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni,
   Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni berarti bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintah dengan indah. Seni memerintah tidak lebih daripada profesi seseorang yang ahli dalam pemerintahannya. Sebagai suatu seni kepemimpinan pemerintahan juga berkenaan dengan bagaimana seni membujuk (persuasif), seni mendorong (motivatif), seni menghubungkan (komunikatif), seni bagaimana memfasilitasi, seni bagaimana mematangkan hubungkan, seni menjadi teladan yang dicontoh oranglain.
3. Kepemimpinan pemerintahan sebagai moral,

> Dalam suatu daerah yang tidak ada kepemimpian pemerintahan sama sekali tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai dekadensi moral yang anarkis seperti perkosaan, perzinahan, pelecehan, pencurian, perampokan, penindasan, perkelahian, pembunuhan dan berbagai jenis lainnya, untuk itu diperlukan seorang pemegang kekuasaan yang menegakan peraturarn dengan kekuasaannya disebut dengan pemimpin pemerintahan"
> (Syafi'ie, 2003:7-9).

Berdasarkan pendapat Inu Kencana Syafi'ie di atas, bahwa kepemimpinan dapat dijelaskan terbagi 3 dimensi. Kepemimpinan sebagai ilmu, yaitu dijadikan disiplin ilmu untuk dibedakan kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan swasta. Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni, yaitu bagaimana seorang pemimpin melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya dengan seni motivatif, komunikatif, dan persuasif. Kepemimpinan pemerintahan sebagai moral, yaitu sikap kepala daerah untuk memberikan masukan kepada bawahannya terkait masalah moral.

2.1.2 Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. Bromley dalam buku *Organisasi Peraturan dan Pengusahaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima* mengatakan :

> "Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang di jualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. PKL dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap". (Bromley, 1979:31)

Pendapat ahli di atas menyatakan bahwa PKL merupakan kegiatan jual beli barang kepada konsumen, namun lokasi berdagangnya tidak permanen. Perda Kota

Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan PKL, khususnya Pasal 1 ayat (29) PKL didefinisikan sebagai berikut:

> Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak

Perda No.4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL ini menjadi penting sebagai acuan untuk menciptakan situasi kondusif bagi penertiban dan pembinaan PKL agar tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah Kota Bandung dan tetap selaras dengan aturan yang tertuang dalam Perda No.11 Tahun 2005 tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban (K3). Perda ini perlunya keterlibatan antar Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), dan bahwa penanganan PKL tidak hanya tanggung jawab Satpol PP, melainkan juga perlu ada peran masyarakat, perguruan tinggi dan *stakeholder*. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 ini, bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah ini perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang memuat mengenai tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris pedagang kaki lima.

Perda No.04 Tahun 2011 pasal 6 ayat (1), menjelaskan Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang :

a. Mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
b. Menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
c. Memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.

Menurut Perda No.04 Tahun 2011 pasal 6 ayat (1) bahwa wewenang Satuan Tugas Khusus yaitu mengatur, menata dan memberikan fasilitas kepada PKL.

Bidang penataan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 6 ayat (3), mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam :

a. Melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/ zona kuning;
b. Melaksanakan penataan di lokasi PKL, tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
c. Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

PKL sering menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan bagi pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL baru di kawasan perkotaan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya.

Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh pemerintah. Pejabat kota dan sebagian kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi menyebabkan lalu-lintas macet, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagi para pejalan kaki, pesaing pedagang toko yang terkena pajak besar.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa PKL sering berdatangan ke Kota-kota besar seperti Kota Bandung, disamping menjadi roda penggerak ekonomi Kota Bandung tetapi di sisi lain PKL menjadi masalah yang harus diselesaikan agar tertib dalam keindahan Kota Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peneliti mengambil teori untuk penelitian ini yaitu dari Veithzal Rivai dengan judul *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* yang terdapat tiga tolak ukur dalam gaya kepemimpinan yaitu Pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama, dan hasil yang dicapai, karena teori ini cocok untuk menunjang penelitian ini. Karakter seseorang yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap gaya kepemimpinan yang melekat kepada dirinya, untuk itu diperlukan penelitian untuk dapat mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang dalam memimpin organisasinya. Kepemimpinan dalam organisasi merupakan suatu hal yang diutamakan dalam ruang lingkup organisasi. Sebuah organisasi tanpa adanya seorang pemimpin, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Gaya kepemimpinan otoriter akan terjadi bila mana Walikota Bandung dalam mengambil setiap keputusan tidak mengikut sertakan dan melibatkan para aparatur, baik itu berupa saran dari para PKL, maupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan partisipatif akan tercipta bilamana Walikota Bandung, cenderung lebih menonjolkan sikap saling bekerjasama dengan para aparatur maupun dengan instansi atau lembaga lainnya, baik itu berupa koordinasi maupun komunikasi.

Gaya kepemimpinan delegatif terjadi bila mana Walikota Bandung menyerahkan keleluasaan pengambilan keputusan, kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa kepada para aparaturnya dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Bandung.

Gaya kepemimpinan walikota Bandung merupakan suatu cara yang digunakan oleh walikota Bandung untuk meningkatkan kinerja para aparaturnya dan memaksimalkan hubungan kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan penertiban PKL di Kota Bandung. Hubungan kerjasama berupa suatu kegiatan walikota Bandung yang berupa suatu koordinasi dan komunikasi, baik yang dilakukan terhadap para aparaturnya di Pemerintah Kota Bandung, maupun terhadap instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap kegiatan program penertiban di Kota Bandung.

Gaya Kepemimpinan menurut Veithzal Rivai menjelaskan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan, apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah maka akan terlihat gaya kepemimpinan. Terdapat tiga pola dasar kepemimpinan menurut Veithzal, pertama yaitu pelaksanaan tugas yang merupakan salah satu faktor yang memperlihatkan gaya kepemimpinan seperti apa yang digunakan oleh Walikota Bandung dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Bandung.

Kedua, hubungan kerjasama yaitu berupa suatu kegiatan Walikota Bandung yang terdiri dari koordinasi dan komunikasi terhadap instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap kegiatan program penertiban PKL di Kota Bandung. Ketiga, hasil yang dicapai yaitu suatu gambaran dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL, yang dapat diukur dari efektivitas yang dicapai maupun kepuasan kerja baik itu dari para aparatur Kota Bandung.

Berdasarkan teori dan pemaparan di atas maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut yaitu:

1. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola menyeluruh yang dimiliki oleh Walikota Bandung untuk mengarahkan dan memberikan berbagai tindakan yang diperlukan, demi tercapinya menertibkan PKL di Kota Bandung melalui program-program penertiban.
2. Gaya kepemimpinan walikota Bandung adalah perwujudan tingkah laku dari walikota Bandung sebagai seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin serta gaya kepemimpinannya dalam menertibkan PKL di Kota Bandung. Gaya kepemimpinan dapat dilihat dari:
    a. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan dari Walikota Bandung dengan melaksanakan penertiban bagi PKL di Kota Bandung, yang meliputi:
        1. Merumuskan masalah yaitu suatu proses awal pengambilan keputusan dari Walikota Bandung dalam program penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung.
        2. Mengumpulkan informasi, yaitu suatu tindakan pengupulan data yang dilakukan oleh Walikota Bandung terkait pelaksanaan program PKL di Kota Bandung.
        3. Melaksanakan keputusan, yaitu suatu tindakan akhir dari Walikota Bandung, setelah melakukan berbagai macam pertimbangan yang didasari oleh data-data yang terjadi

dilapangan terkait program penertiban PKL di Kota Bandung.

b. Hubungan kerjasama adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Walikota Bandung, berupa koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait menyangkut program penertiban PKL di Kota Bandung, yang meliputi:

1. Koordinasi, yaitu susunan langkah-langkah yang dibuat oleh Walikota Bandung untuk melakukan pembagian kerja kepada para aparaturnya maupun kepada instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung, yang meliputi :

    a. Mengarahkan yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam mengarahkan aparaturnya terkait kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Bandung.

    b. Mengintegrasikan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Walikota Bandung untuk menghubungkan seluruh unit-unit kerja terkait kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Bandung.

    c. Mengkoordinasikan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Walikota Bandung, untuk mengembangkan pola diseluruh unit-unit kerja terkait kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Bandung.

    d. Pengintegrasian, yaitu suatu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Walikota Bandung dengan instansi atau

lembaga lain yang terkait untuk mempermudah kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Bandung.

2. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam menjalin suatu hubungan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain yang terkait, menyangkut program penertiban bagi para PKL di Kota Bandung, yang meliputi :
   a. Sifat Informasi adalah suatu cara dari Walikota Bandung untuk memahami setiap informasi yang didapatkannya, menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung.
   b. Komunikasi Organisasi adalah jalinan komunikasi yang dilakukan oleh Walikota Bandung dengan instasi lembaga yang menjadi mitra kerjanya, menyangkut kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung.
   c. Komunikasi antar pribadi adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh Walikota Bandung dengan para aparaturnya terkait pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung.

c. Hasil yang dicapai adalah suatu gambaran dari pencapaian Walikota Bandung dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Bandung , yang meliputi:.

1. Upaya yaitu pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam melaksanakan kegiatan penertiban PKL di kota Bandung, yang meliputi :
    a. Sumberdaya adalah segala suatu yang dimiliki oleh Walikota Bandung baik itu berupa manusia (aparatur) maupun finansial, dalam pelaksanaan kegiatan program penertiban PKL di Kota Bandung.
    b. Sarana adalah suatu alat bantu jangka pendek yang dibutuhkan oleh Walikota Bandung beserta aparaturnya dalam menjalankan penertiban PKL di Kota Bandung, agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
    c. Prasarana adalah suatu yang alat bantu jangka panjang yang dibutuhkan oleh Walikota Bandung beserta aparaturnya untuk melaksanakan kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kepuasan kerja adalah pemenuhan kebutuhan dan harapan yang dibuat oleh Walikota Bandung, terkait program penertiban PKL di Kota Bandung, yang meliputi :
    a. Kepuasan kerja, yaitu kepuasan yang dirasakan oleh para aparatur terhadap gaya kepemimpinan Walikota

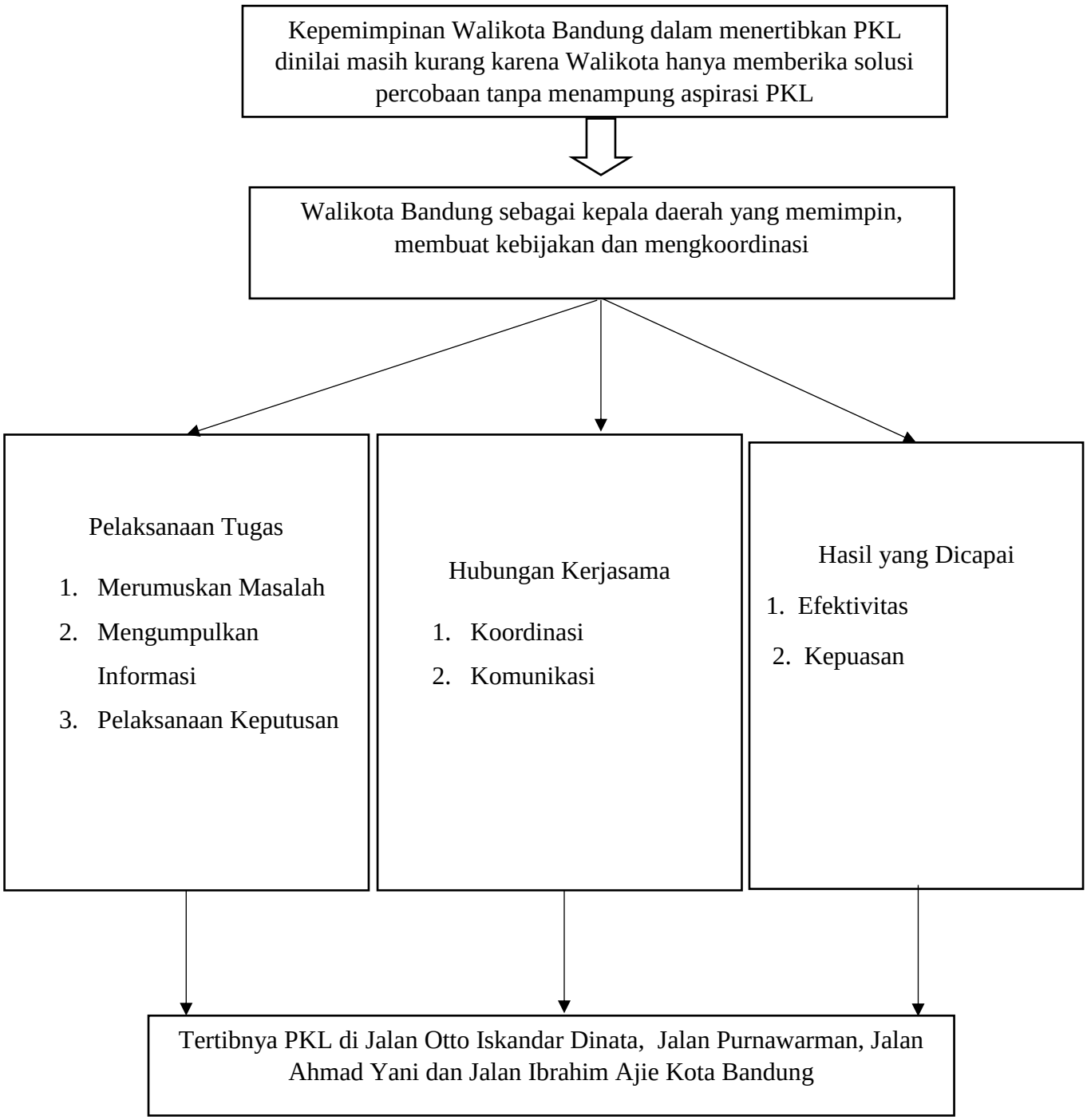
Bandung, menyangkut penertiban PKL di Kota Bandung.

b. Kepuasan masyarakat, yaitu suatu cara dari Walikota Bandung dalam memberikan kepuasan terhadap para PKL sebagai penerima layanan penertiban.

Gaya kepemimpinan yang menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin serta terus menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Ketiga model kepemimpinan di atas merupakan ukuran untuk menilai gaya kepemimpinan walikota Bandung dalam menertibkan PKL di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran seperti gambar berikut ini:

Bagan 2.1
Model Kerangka Pemikiran



(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016)

2.3 Preposisi

Upaya penertiban PKL di Kota Bandung akan berhasil dengan baik apabila Walikota Bandung menerapkan pola dasar gaya kepemimpinan yaitu pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama dan hasil yang dicapai.